

BAB I

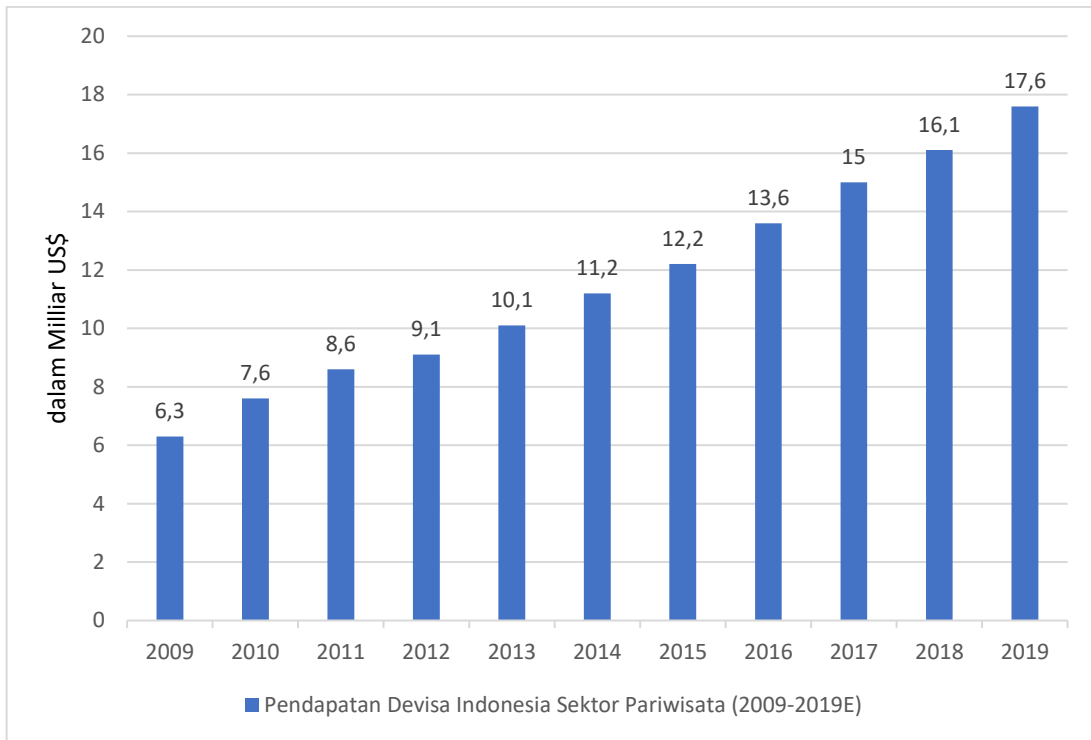
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata ialah bidang potensial yang harus dikembangkan oleh pemerintah sebagai upaya pembangunan nasional dan menjadi sumber pendapatan daerah. Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak keindahan alam serta bermacam kawasan wisata unik, sehingga menjadi daya tarik untuk pelancong lokal ataupun luar negeri. Indonesia berperan besar dalam meningkatkan bidang pariwisata. Indonesia mempunyai 17.504 pulau, dan terdapat 300 kelompok etnis, 742 bahasa, situs warisan dunia, dan 51 taman nasional. Ambisi sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2045 sebagai tujuan wisata paling populer di dunia dengan 73,6 juta pengunjung internasional dan pertumbuhan mata uang asing sejumlah 4,9% setiap tahun.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah tidak terlepas dari adanya kenaikan sektor pariwisata yang pesat. Manajemen yang baik akan berdampak pada keuntungan dan pendapatan daerah. Sektor pariwisata mempunyai potensi menjadi salah satu pendorong perekonomian di setiap daerah. Berkembangnya sektor pariwisata akan mampu mendongkrak sektor lainnya seperti transportasi, ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan daerah.

Gambar 1. 1
Pendapatan Devisa Indonesia Bidang Pariwisata (2009-2019E)

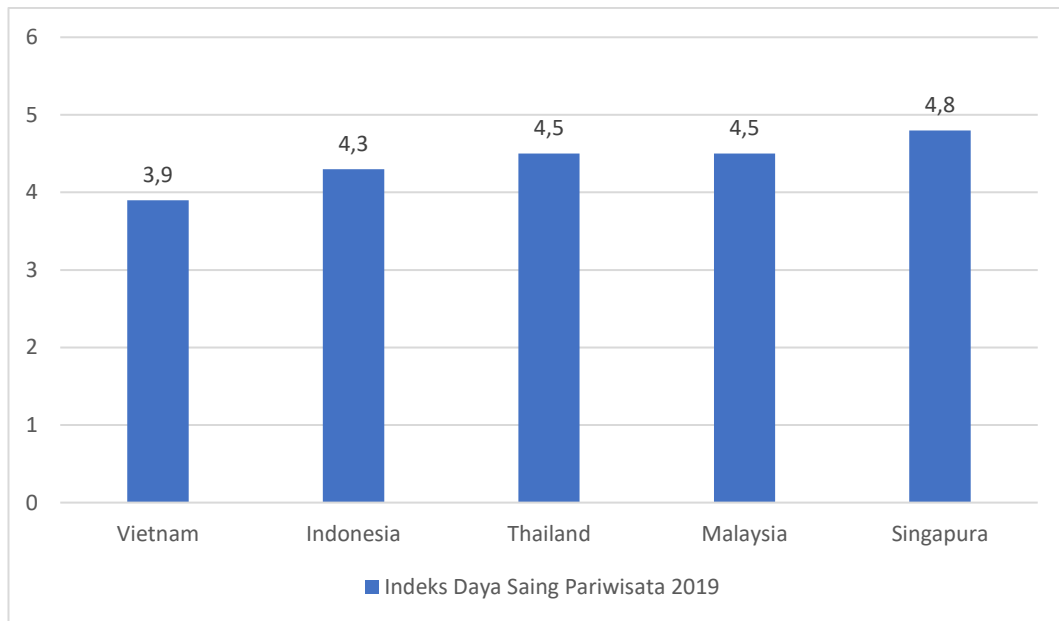


Sumber: katadata.co.id

Pendapatan devisa Indonesia melalui sektor pariwisata terus meningkat signifikan dari 6,3 miliar USD (2009) hingga mencapai 17,6 miliar USD (Kemenpar, Maret 2019). Berdasarkan data Kemenpar, pendapatan devisa sektor pariwisata ada di urutan ke empat sebagai pemberi devisa tertinggi di tahun 2015 sejumlah \$12,23 miliar di bawah gas bumi dan minyak, batu bara, serta kelapa sawit. Selain itu, pada 2019 pendapatan devisa industri pariwisata diproyeksikan mencapai \$20 miliar dan hendak menjadi terbesar melampaui hasil ekspor sawit ataupun minyak serta gas bumi. Upaya pemerintah dalam memenuhi target devisa

sector pariwisata tersebut yakni dengan menargetkan 20 juta jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019.

Gambar 1. 2
Indeks Daya Saing Pariwisata Tahun 2019



Sumber: katadata.co.id

Berdasar indeks daya saing pariwisata tahun 2019 (dalam laporan WEF, 2019), peringkat Indonesia meningkat ke peringkat 40 pada tahun 2019 dari 42 pada tahun sebelumnya. Skor daya saing pariwisata yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 4,30 dari sebelumnya 4,16 pada tahun 2017. Akan tetapi, Indonesia kini ada di belakang Malaysia, Singapura, dan Thailand di Asia Tenggara. Tantangan terbesar Indonesia terhadap aspek-aspek yang dilihat dalam WEF, yakni persoalan dengan bencana alam, infrastruktur, dan ketersediaan hotel.

Pemerintah dalam upaya mengembangkan pariwisata membuat kebijakan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai

Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengenai Cagar Budaya. Selain itu, termuat di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 hingga 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 mengenai Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, Keppres Nomor 22 Tahun 2011 mengenai Badan Promosi Pariwisata Indonesia, serta Inpres Nomor 16 Tahun 2005 mengenai Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 yang diatur pada PP Nomor 50 Tahun 2011 terdapat beberapa strategi, yakni membangun destinasi wisata dalam negeri. Di antaranya, membangun daya tarik di bidang pariwisata, membangun aksesibilitas pariwisata, serta membangun sarana umum. Selain itu, memperkuat industri pariwisata, meliputi meningkatkan kompetisi pada produknya. Kemudian, pemasaran pariwisata dalam negeri, meliputi promosi maupun mengembangkan pasar wisatawan.

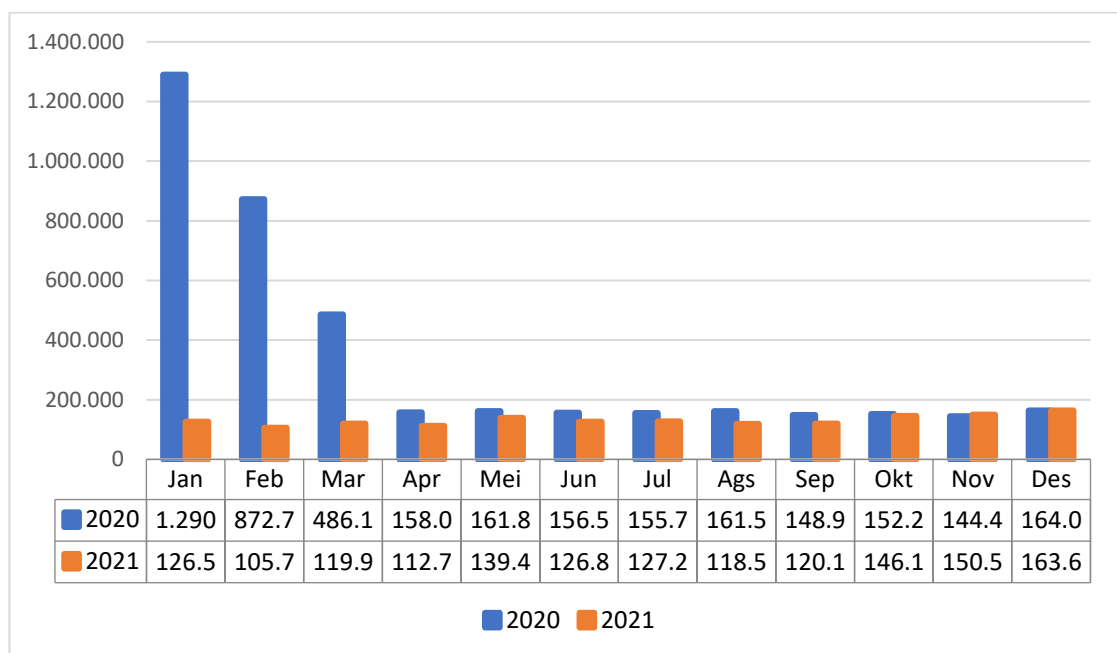
Perkembangan kepariwisataan di Indonesia ti tiap tahunnya tetap di menampilkan pertumbuhan yang pesat. Perkembangan yang terjadi diakibatkan oleh berbagai hal, seperti meningkatnya jumlah orang yang mempunyai pendapatan yang setiap tahunnya bertambah, pergantian struktur sosial ekonomi negara di dunia, dan perubahan sosial di masyarakat. Oleh karenanya, terkait peningkatan pariwisata maka pemerintah, swasta, serta masyarakat harus bekerja sama. Selain itu, sangat penting untuk mempromosikan pariwisata berdasarkan keragaman, keunikan, dan karakteristik nasional. Di sisi lain, tetap mempertahankan penekanan

pada keragaman untuk mengatasi dinamika global dan meningkatkan hak individu guna menikmati masa berlibur dengan mengunjungi lokasi wisata.

Namun, dalam kelajuan perkembangannya sektor pariwisata nasional hingga pariwisata daerah di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup dalam karena diakibatkan adanya virus Covid-19. Virus ini menyerang secara global dan berdampak pada penurunan ekonomi dunia dan menyebabkan seluruh sektor tiap negara mengalami penurunan. Upaya Pemerintah Indonesia dalam memperkecil dampak Covid-19 di sektor Pariwisata adalah dengan kebijakan stimulus. Pada 25 Februari 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan paket stimulus Rp 10,3 triliun wisata, termasuk pengembalian uang tiket dan pengurangan pajak restoran (dalam Kontan.co.id, 2020).

Gambar 1. 3

Kunjungan Bulanan Wisatawan Mancanegara 2020 & 2021 Indonesia



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi, Kemenparekraf

Menurut statistik kunjungan wisman tahun 2021, kunjungan wisman ke Indonesia pada Desember 2021 sebanyak 163.619, turun -0,28 persen dari Desember 2020 yakni 164.079.

Tabel 1. 1
Jumlah Wisatawan Provinsi Jawa Tengah 2017-2021

No	Wisatawan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nasional	40.118.470	49.943.607	57.900.863	22.629.085	21.332.409
2.	Mancanegara	781.107	677.168	691.699	78.290	1.793
Jumlah Total		40.899.577	49.620.775	58.592.562	22.707.375	21.334.202

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Berdasar tabel di atas, memperlihatkan bila jumlah wisatawan Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya meningkat. Namun, pada tahun 2020 jumlah total wisatawan menurun menjadi 22.707.375 wisatawan dengan 22.629.085 wisatawan nasional/domestik dan 78.290 wisatawan mancanegara dan mengalami penurunan menjadi 21.334.202 wisatawan pada tahun 2021.

Kabupaten Kebumen termasuk dalam wilayah Jawa Tengah bagian selatan yang mempunyai potensi-potensi wisata. Secara Topografis bagian Utara dan bagian Barat Daya adalah pegunungan, sedangkan bagian tengah sampai ke bagian Tenggara adalah dataran rendah. Oleh karena itu, Kabupaten Kebumen mempunyai bentuk wilayah yang beragam sehingga terdapat berbagai wisata, seperti alam, pantai, pendidikan, serta air. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2025 diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Kebumen No. 7 Tahun 2017. Kab. Kebumen memiliki batasan secara langsung dengan Kab. Purworejo serta Kabupaten Wonosobo (Timur). Adapun utara

berbatasan dengan Kab. Banjarnegara; lalu sebelah baratnya Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap, serta Samudera Hindia (Selatan).

Tabel 1. 2

Pencapaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kunjungan wisatawan	1.790.075	2.020.878	2.927.444	854.315	966.941
2.	Presentase peningkatan kunjungan wisata (%)	19,05	14,17	44,86	-70,82	13,18
3.	Lama tinggal wisatawan (hari)	0,51	0,57	1,03	0,32	1,37

Sumber: LKjIP Disporawisata Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Berdasar penuturan di atas, pencapaian kinerja urusan pariwisata Kabupaten Kebumen diambil dari data objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah dan objek wisata non Pemda. Pada tahun 2017 hingga 2019 terdapat peningkatan kunjungan positif dan persentase peningkatan kunjungan wisata terbesar pada tahun 2019 sebesar 44,86 persen. Namun, adanya pandemi Covid-19 berakibat pada pertumbuhan kunjungan wisata di Kabupaten Kebumen tahun 2020 menurun drastis menjadi 854.315 wisatawan serta persentase peningkatan kunjungan turun menjadi -70,82 persen. Pada tahun 2021, terdapat peningkatan kunjungan sebesar 13,18 persen dengan jumlah wisatawan sebesar 966.941 wisatawan. Lama tinggal wisatawan di tempat wisata pada tahun 2017 menjadi 0,51 hari, tahun 2018 menjadi

0,57 hari dan di tahun 2019 sebesar 1,03 hari. Tahun 2020 mengalami penurunan hanya mencapai 0,32 hari dan di tahun 2021 ada kenaikan 1,37 hari.

Tabel 1. 3
Potensi Wisata Kabupaten Kebumen

Wisata Alam	Wisata Buatan	Minat Khusus
<ul style="list-style-type: none"> - Balai Informasi dan Konservasi Kebumian (LIPI) - Bukit Hud - Goa Jatijajar - Pantai Karangbolong - Pantai Logending - Pantai Menganti - Pantai Pecaron - Pantai Pedalen - Pantai Petanahan - Pantai Sawangan - Pantai Suwuk - Pemandian Air Panas (PAP) Krakal - Pentulu Indah - Sawangan Adventure - Wisata Alam Jembangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Benteng Van Der Wijck - Waduk Sempor - Waduk Wadaslintang - Wisata Alian Butterfly 	<ul style="list-style-type: none"> - Goa Petruk

Sumber: Disporapar Provinsi Jawa Tengah

Berbagai jenis potensi wisata di Kabupaten Kebumen dapat dikembangkan, seperti terlihat pada tabel di atas. Potensi wisata Kabupaten Kebumen yakni alam, buatan, dan minat khusus. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen mengelola pariwisata daerah atas nama pemerintah. Selain itu, terdapat 9 lokasi wisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen, yakni objek wisata Goa Jatijajar, Pantai Suwuk, Pantai Logending, Pantai Petanahan, PAP Krakal, Waduk Sempor, Pantai Karangbolong, Goa Petruk, dan Waduk Wadaslintang. Potensi wisata yang besar harus diimbangi dengan pengelolaan yang

efektif agar dapat dimanfaatkan dan memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata.

Tabel 1. 4
Jumlah Pengunjung Objek Wisata Kepemilikan Pemerintah Kabupaten
Kebumen 2017-2021

Objek Wisata	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Goa Jatijajar	395.630	389.854	344.736	98.291	84.079
Pantai Suwuk	246.100	287.085	193.778	86.270	81.819
Pantai Petanahan	166.201	156.885	128.623	58.245	47.793
Goa Petruk	7.803	6.579	6.994	2.588	1.881
PAP Krakal	28.168	48.921	85.987	28.449	25.546
Waduk Sempor	47.948	39.485	35.926	22.136	34.746
Waduk Wadaslintang	31.766	34.167	32.850	10.473	16.216
Pantai Karangbolong	27.744	23.551	31.279	17.864	15.550
Pantai Logending	136.284	92.642	87.087	34.543	27.099
Total Kunjungan	1.087.644	1.079.169	947.260	358.859	334.729

Sumber: LKjIP Disporawisata Kabupaten Kebumen Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung objek wisata kepemilikan Pemkab Kebumen tahun 2017-2019 menurun dari 1.087.644 wisatawan (2017) menjadi 947.260 wisatawan (2019). Turunnya total kunjungan

tersebut juga terjadi pada tahun 2020 dimana sektor wisata terkena dampak dari adanya pandemi yang menyebabkan sedikitnya kunjungan pada tahun 2020 dari 947.257 wisatawan (2019) menjadi 385.249 wisatawan (2020). Objek wisata kepemilikan Pemkab Kebumen sepanjang tahun 2016-2020 terpopuler berdasarkan total kunjungan wisatawan yakni Goa Jatijajar, Pantai Suwuk, dan Pantai Petanahan serta objek wisata dengan jumlah pengunjung terendah sepanjang tahun 2016-2020 yaitu Pantai Karangbolong, Waduk Wadaslintang, dan Waduk Sempor.

Arief Yahya (dalam Merdeka.com, 2019) memaparkan bila meningkatkan kunjungan wisatawan maka sebuah destinasi harus memiliki unsur 3A yaitu akses, amenitas, atraksi. Menurutnya, destinasi wisata Kebumen sudah baik tetapi harus mempunyai atraksi yang berkelas, menarik perhatian, atau melibatkan wisatawan serta harus menghadirkan amenitas yang baik, nyaman, dan kemudahan akses.

Menurunnya jumlah kunjungan objek wisata kepemilikan pemerintah kabupaten Kebumen tahun 2019 dari tahun sebelumnya juga terlihat dari realisasi pendapatan sektor pariwisata Pemkab Kebumen tahun 2019 yang hanya dapat terealisasi 85 persen. Realisasi pendapatan sektor pariwisata sekadar menyentuh angka Rp8,69 miliar dari sasaran sejumlah Rp10,15 miliar yang ditargetkan Pemkab Kebumen. Realisasi pendapatan objek wisata yang mampu melampaui target adalah Goa Jatijajar dengan mendapat Rp 4,1 miliar dari target Rp 3,8 miliar dan Pantai Karangbolong mendapat Rp 240 juta dari target Rp 209 juta. Namun, pendapatan objek wisata kepemilikan Pemkab Kebumen lainnya jauh dari target, meliputi Pantai Logending mendapat Rp 626 juta dari target Rp 1,2 miliar (51 persen), Goa Petruk mendapat Rp 59 Juta dari target Rp 103 Juta (57 persen), Pantai

Suwuk memperoleh Rp1,4 miliar dari Rp2,1 miliar (68 persen) (dalam Kebumenekspres.com, 2020).

Sepanjang tahun 2020, jumlah kunjungan objek wisata kepemilikan Pemkab Kebumen mengalami penurunan drastis karena dampak dari pandemi Covid-19 yang hanya mencapai 385.249 kunjungan wisatawan. Hal tersebut juga terlihat dari realisasi pendapatan dari 9 (sembilan) objek wisata yang dikelola Pemkab Kebumen mencapai 79,23 persen. Realisasi pendapatan tersebut sebesar Rp 3,367 miliar dari target Rp 4,255 miliar dengan diraih 3 (tiga) dari 9 (sembilan) objek wisata yang dapat meraup pendapatan diatas 100 persen, yakni Waduk Sempor mendapat Rp 156,359 (127,75 persen), PAP Krakal mendapat Rp 14,997 juta (105,28 persen) dan Pantai Karangbolong mendapat Rp 52,978 juta (160,04 persen) (dalam Krjogja.com, 2021).

Selain itu, penutupan lokasi wisata sejalan dengan strategi pemerintah guna menghentikan pandemi Covid-19 yang turut berdampak pada industri pariwisata daerah. Penutupan seluruh destinasi wisata dilaksanakan untuk menghadapi libur tahun 2021 ditutup selama 4 hari dari 31 Desember 2020 sampai 03 Januari 2021 (krjogja.com). Menutup seluruh objek wisata dilakukan kembali pada tanggal 22 Juni hingga 30 Juni 2021 sesuai Surat Edaran Bupati Kebumen No. 443/1173 perihal Upaya Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 pascalibur lebaran di Kab. Kebumen (tribunjateng.com). Adanya PPKM Darurat yang berlaku untuk wilayah Jawa-Bali juga mengakibatkan penutupan objek wisata di Kabupaten Kebumen semenjak 03 Juli hingga 20 Juli 2021 sesuai Surat Edaran Bupati Kebumen No. 443/1284 perihal PPKM Darurat Covid-19 (dalam gatra.com, 2021).

Menurut G.R. Terry dalam Hariani (2017:6-8) memaparkan bila manajemen ialah tahapan unik, yang meliputi proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, maupun pengawasan yang dijalankan, dan meraih target yang sudah ditetapkan dengan pendayagunaan SDM dan lainnya. Adanya berbagai permasalahan dalam manajemen pariwisata di Kabupaten Kebumen di legitimasi dari dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 yang menjelaskan bahwa berbagai permasalahan terkait pariwisata antara lain yakni daya saing pariwisata yang rendah, rendahnya kualitas dan daya saing usaha jasa dan sarana pariwisata, aksesibilitas ke objek wisata yang rusak, kondisi destinasi yang kurang terawat, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pemasaran pariwisata, dan belum mempunya kelembagaan pariwisata dalam mendongkrak aktivitas pariwisata.

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti menemukan ada indikasi beberapa permasalahan yang ada pada manajemen pariwisata Kabupaten Kebumen yakni adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas yang kurang terawat

Berdasarkan pengamatan awal peneliti secara langsung di tempat wisata yang ada di Kabupaten Kebumen, ditemukan berbagai fasilitas yang ada di kawasan objek wisata kondisinya kurang terawat dan ada yang rusak.

Gambar 1. 4
Kondisi Fasilitas Toilet



Sumber: Dokumen Peneliti, 22 Desember 2021

Berdasarkan gambar 1.4, dapat diketahui bahwa kondisi fasilitas toilet bagi pengunjung/wisatawan dalam kondisi tidak terawat dengan keadaan pintu yang rusak, air yang tidak mengalir, kotor.

Gambar 1. 5
Kondisi Fasilitas Lain



Sumber: Dokumen Peneliti, 22 Desember 2021

Berdasarkan gambar 1.5 terlihat bahwa terdapat adanya kerusakan fasilitas pendukung pada objek wisata, gambar pertama merupakan akses pejalan kaki ataupun kendaraan yang tidak layak untuk difungsikan kembali karena kondisinya

yang berlumpur dan becek. Gambar kedua merupakan akses pejalan kaki untuk menuju objek wisata, namun kondisi material yang sudah rusak dan berlumut. Kondisi ini tentu akan mengurangi kenyamanan wisatawan dalam berkunjung, mengurangi estetika, dan dapat membahayakan wisatawan.

2. Aksesibilitas menuju objek wisata yang rusak

Aksesibilitas menuju objek wisata menjadi hal penting dalam meningkatkan peningkatan objek wisata, apabila akses menuju objek wisata rusak akan berpengaruh pada kenyamanan dan keputusan wisatawan serta berdampak besar ke depannya apabila akses tidak diperbaiki secepatnya.

Gambar 1. 6

Kondisi Aksesibilitas ke Objek Wisata



Sumber: SuaraMerdeka dan TribunNews

Berdasarkan gambar 1.6, menunjukkan bahwa kondisi jalan menuju objek wisata masih rusak dan berbahaya karena sempit, berkelok, dan naik turun. Apabila tidak dilakukan perbaikan secepatnya akan menghambat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Kebumen. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 23 poin (a) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Permasalahan ini juga

disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, bab IV, halaman 17, dimana aksesibilitas yang kurang terawat menjadi suatu permasalahan dalam manajemen urusan pariwisata.

3. Permasalahan sampah

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, banyak dijumpai permasalahan sampah yang ada pada objek wisata. Permasalahan sampah tentu akan berakibat pada citra objek wisata itu sendiri. Apabila sampah yang berserakan tersebut tak kunjung diselesaikan tentu akan berakibat pada pandangan wisatawan.

Gambar 1. 7
Permasalahan Sampah



Sumber: Dokumen Peneliti, 25 Desember 2021

Berdasarkan gambar 1.7 Menunjukkan bahwa banyak ditemui sampah yang berserakan di area objek wisata. Kotornya objek wisata akibat permasalahan sampah akan mengurangi keindahan objek wisata itu sendiri dan tentu mencemari lingkungan.

Sesuai pemaparan tersebut, muncul pertanyaan, “mengapa jumlah kunjungan wisatawan di Objek Wisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen terus mengalami penurunan?”. Atas dasar itulah, dari pertanyaan itu, peneliti memiliki ketertarikan menggunakan judul "**Manajemen Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Di Era Covid-19**".

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalahnya ialah:

1. Terjadinya penurunan jumlah pengunjung wisatawan pada objek wisata kepemilikan Pemerintah Daerah dari tahun 2017 hingga 2021.
2. Fasilitas yang kurang terawat
3. Aksesibilitas menuju objek wisata yang rusak
4. Permasalahan sampah

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan pada kajian ini, seperti:

1. Bagaimanakah proses manajemen pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen selama Covid-19?
2. Apa saja faktor sumber daya yang memengaruhi proses manajemen pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen di era Covid-19?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses manajemen pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen di era Covid-19.
2. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi proses manajemen pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen di era Covid-19.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis, diharapkan dapat menjadi faktor dalam studi serta pengembangan di masa depan dalam penerapan ilmu pengetahuan, khususnya administrasi publik yang menangani manajemen.
2. Secara praktis kajian ini bisa menjadi acuan untuk pemerintah maupun lembaga mengenai usulan pengelolaan yang lebih baik. Terkhususnya dalam pengembangan pariwisata, dan sebagai alat penilaian bagi pemerintah terkait dalam upaya pengembangan pariwisata di Kebumen.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu berfungsi sebagai referensi bagi peneliti yang melakukan studi baru. Kondisi ini diperlukan guna meninjau teori yang dipergunakan untuk mengevaluasi kajian yang sudah terlaksanakan. Kajian sebelumnya dipakai sebagai referensi ketika menambahkan bahan tinjauan peneliti. Berikut ini ialah referensi yang dipakai:

Pertama, penelitian oleh Annisa Dengo dengan judul “Manajemen Objek Wisata (Studi Kasus Objek Wisata Lombongo” tahun 2020. Dalam penelitian ini,

peneliti menyimpulkan bila Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengimplementasikan empat peran manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Berdasarkan fungsi penggerakan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan dengan sesuai. Sedangkan fungsi perencanaan belum dilaksanakan secara memadai karena keterbatasan anggaran. Persamaan penelitian ini terletak pada peranan manajemen sesuai penuturan G.R. Terry: *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Adapun perbedaannya terletak pada lokusnya, yakni Objek Wisata Lombongo. Lalu, kajian yang hendak terlaksana lokasinya berada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen.

Kedua, kajian milik Ali Fajar Sidiq dan Ida Hayu Dwimawanti dengan judul “Manajemen Pariwisata Oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan” tahun 2019. Pada kajian ini, memperjelas bila manajemen pariwisata di Kab. Pekalongan yang dilaksanakan pihak Dinas masih belum optimal. Permasalahannya yaitu, seperti terbatasnya anggaran, belum adanya mekanisme pengendalian, minimnya kompetensi pegawai, kurang memadainya dan minimnya fasilitas wisata, kurang memadainya kualitas dan total akomodasi, dan belum maksimalnya promosi wisata serta kerja sama yang terlaksana antarpihak swasta. Kesamaan kajian ini dengan kajian yang hendak dilaksanakan, yaitu peranan manajemen G.R. Terry: *planning, organizing, actuating, controlling* serta metode penelitiannya. Perbedaan kajian ini dengan kajian yang hendak terlaksana berada di lokus yang berlainan: kajian ini lokusnya di Kabupaten Pekalongan, sedangkan kajian yang hendak dilaksanakan lokusnya di Kabupaten Kebumen.

Ketiga, kajian milik Ernawaty dengan judul “Manajemen Strategi Pengembangan Objek Wisata Daerah” tahun 2019. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bila proses pengelolaan yang dilakukan belum optimal, seperti manajemen strategi pengembangan objek wisata yang bertentangan dengan kebijakan maupun sasaran, serta target yang sudah dirancang. Selain itu, kurang jelas rincian kerja pada Dinas dengan pihak UPT, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, serta tanpa ada ketentuan dasar yang jelas untuk melaksanakan monitoring. Kendala yang ditemui pada manajemen strategi dinas pariwisata selama mengembangkan objek wisata Pantai Kesona di Kec. Rupa Utara, Kab. Bengkalis ialah minimnya anggaran, rendahnya tingkat SDM pada UPT, dan kurangnya sarana prasarana. Persamaan kajian ini dengan yang hendak dilaksanakan ada di fungsi manajerialnya sesuai penjelasan G.R. Terry. Perbedaan kajian yang hendak dilaksanakan ada di lokusnya, yakni Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis. Kajian yang hendak dilaksanakan lokusnya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen.

Keempat, kajian milik Afriani Susanti dan Argo Pambudi dengan judul “Manajemen Objek Wisata Pantai Jatimalang Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo” tahun 2018. Pada kajian ini, peneliti menyimpulkan Manajemen Objek Wisata Pantai Jatimalang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Purworejo belum terlaksana baik. Seperti kurangnya perencanaan yang mencakup semua aspek, pegawai yang belum mampu melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh organisasi, koordinasi yang belum dilaksanakan dengan baik antara pemerintah maupun masyarakat sekitar, termasuk pengawasan yang dilaksanakan tidak menyeluruh oleh Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kab. Purworejo. Kendala yang dihadapi yakni setiap pengelola objek wisata masih mempunyai tujuan yang berbeda dari tujuan yang telah ditetapkan Disparbud Kabupaten Purworejo, sumber daya masyarakat sekitar objek masih kurang, adanya pungutan liar, dan kurangnya tanggung jawab pengelola objek wisata dalam melakukan tugasnya. Persamaan kajian ini dengan kajian yang hendak dilaksanakan, yaitu di fokus kajiannya: manajemen. Perbedaan kajian ini dengan kajian yang hendak dilaksanakan yakni pada fungsi manajemen Henry Fayol. Kajian yang hendak dilaksanakan mempergunakan fungsi manajemen menurut G.R. Terry: POAC.

Kelima, kajian milik Wempi Raymon Giri berjudul “Manajemen Objek Wisata Pantai Air Manis Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang” tahun 2017. Dalam kajian ini, peneliti menyimpulkan bahwa manajemen dilakukan masih belum maksimal, pada tahap perencanaan terdapat hambatan pada peluang dan potensi yang belum dilakukan dan dimanfaatkan. Dalam pengorganisasian, kurangnya sumber daya menjadi hambatan. Belum adanya alur tahapan yang jelas dalam melaksanakan perbaikan juga menjadi kendala dalam pengendalian yang ditemui. Persamaan pada kajian ini dengan kajian yang hendak dilaksanakan yakni berpendekatan kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada fungsi manajemen H. Koontz dan O’Donnel. Lalu, kajian yang hendak dilaksanakan menerapkan fungsi manajemen menurut G.R Terry: POAC.

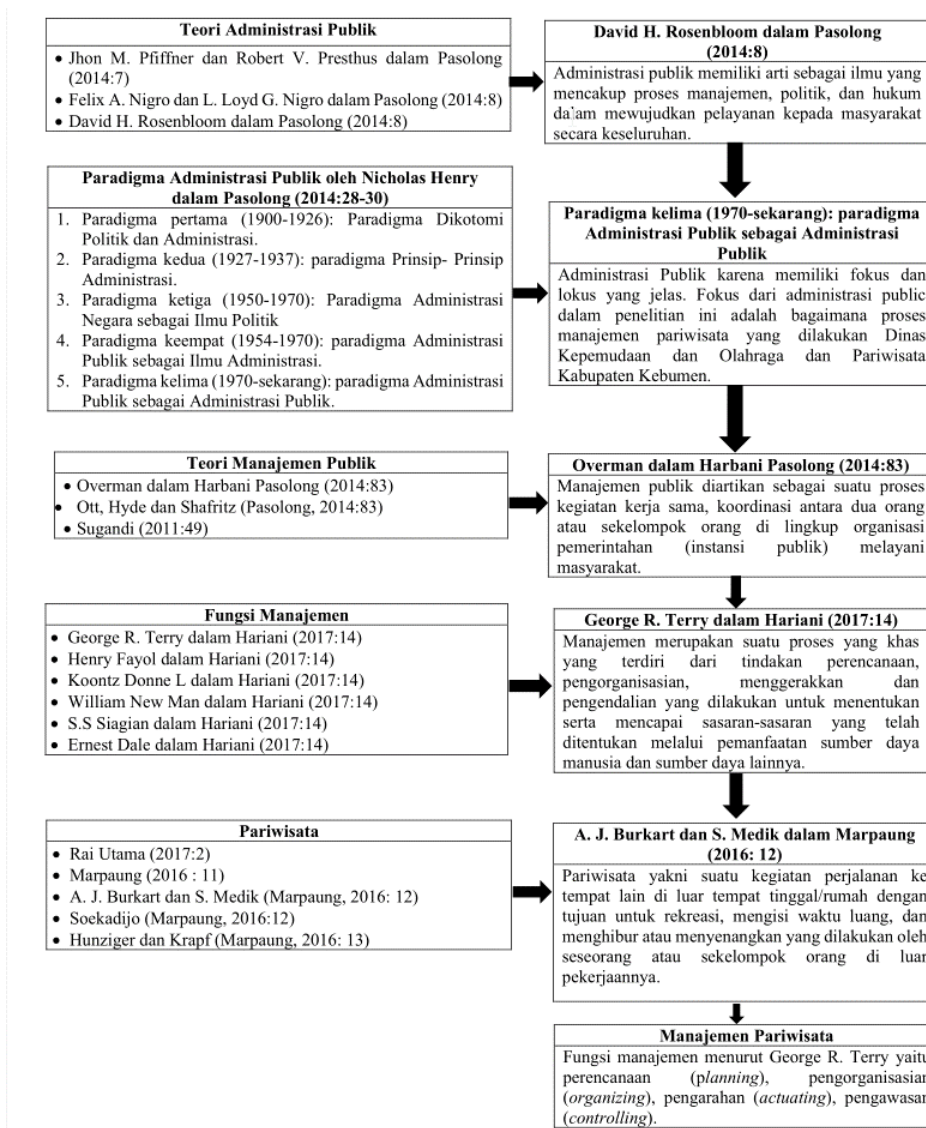
Keenam, penelitian oleh Sarifin dengan judul “Manajemen Wisata Religi Pada Makam Sultan Suriansyah” tahun 2019. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa sudah menerapkan fungsi manajemen dengan baik yang

bersifat fisik dan praktis, melalui kuatnya hubungan pengurus-pengurus yang aktif. Dalam hal mengevaluasi pelayanan secara keseluruhan kurang berjalan. Kendala atau hambatan lain terutama dalam pelayanan yang diberikan oleh pengurus pada kegiatan atau *event* besar. Persamaan kajian ini dengan yang hendak dilaksanakan ada di fungsi manajemen menurut G.R. Terry: POAC. Adapun perbedaannya yakni pada lokusnya, yakni Makam Sultan Suriansyah, sedangkan kajian yang hendak dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen.

Ketujuh, kajian mikik Garry R. CH. Suyodono dengan judul “Pengelolaan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung” tahun 2021. Pada kajian ini memberi simpulan bila tata kelola potensi wisata oleh dinas pariwisata belum optimal karena kurangnya upaya pengelola memperhatikan sarpras dan kebersihan yang ada di objek wisata serta kurangnya kreativitas penunjang untuk wisata hiburan, dan kurangnya promosi pariwisata yang dilakukan. Persamaan kajian ini dengan kajian yang hendak dilaksanakan ada di fungsi manajemen menurut G.R. Terry: POAC. Adapun perbedaannya berlokus di Dinas Pariwisata Kota Bitung, sedangkan kajian yang hendak dilaksanakan berada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kebumen.

Gambar 1. 8

Kajian Teori



Sumber: Dokumen Penulis

1.6.2 Administrasi Publik

Administrasi publik mencakup penerapan regulasi pemerintah yang ditentukan berdasar pada pengaturan usaha perorangan dan kelompok ataupun lembaga-lembaga perwakilan politik untuk menjalankan peraturan pemerintah, sebuah proses terkait penerapan regulasi-regulasi pemerintah, mengarahkan

keterampilan dan metode yang tidak terhitung, memberi arahan maupun tujuan ke beberapa pihak, sesuai penuturan Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus dalam Pasolong (2014:7).

Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro dalam Pasolong (2014:8) menjabarkan administrasi publik sebagai (1) sekelompok orang yang bekerja sama di lingkungan pemerintahan. (2) Terdapat tiga cabang pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, maupun relasi antara mereka. (3) Memiliki peran krusial untuk merumuskan kebijakan pemerintah sehingga menjadi unsur dari proses politik. (4) Terkait kuat dengan bermacam jenis kelompok swasta maupun individu selama memberikan layanan ke masyarakat.

Administrasi publik ialah penggunaan konsep, ide dan metode manajemen, hukum dan politik agar bisa menunaikan harapan pemerintah di bidang legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan fungsi regulasi dan pelayanan kepada masyarakat secara umum atau sebagian (David H. Rosenbloom dalam Pasolong, 2014:8).

Beberapa keterangan mengenai definisi di atas, maka disimpulkan bila administrasi publik sebagai kegiatan kolaboratif yang dilaksanakan badan/instansi untuk menjalankan tanggung jawab secara lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, cakupan administrasi yang disebutkan oleh Nicholas Henry dalam Pasolong (2014:19), seperti:

- a. Organisasi publik, sebenarnya berhubungan dengan bentuk organisasi dan karakter birokrasi.

- b. Manajemen publik berhubungan dengan bentuk maupun ilmu manajemen, penilaian program dan produktivitas, budget dan tata kelola SDM.
- c. Penerapan yang melibatkan pendekatan kepada peraturan publik dan pelaksanaannya, swastanisasi, administrasi antarpemerintahan maupun etika pemerintah.

Dari beberapa penjelasan tentang ruang lingkup administrasi publik, dapat dipahami maka ruang lingkungannya yakni organisasi publik, pelayanan publik, kebijakan publik, manajemen publik, birokrasi publik, administrasi kepegawaian negara kinerja, serta etika administrasi publik. Orientasi kepentingan publik merupakan bagian penting dari ruang lingkup administrasi publik.

1.6.2.1 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry dalam Pasolong (2014:28-30), memaparkan bila administrasi publik mengalami lima pergeseran paradigma, yaitu:

Paradigma pertama (1900-1926), dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Fokus ilmu Administrasi Negara secara khusus terhadap persoalan kepegawaian, organisasi, dan menyusun anggaran dana bagi pemerintahan. Lokus paradigmanya ialah mempersoalkan di mana semestinya administrasi negara ini berada. Tokoh yang terkenal, yakni Frank J. Goodnow dan Leonald D. White melalui buku dengan judul *Politics and Administration*, mengungkapkan bila terdapat dua fungsi utama pemerintahan yang berlainan, yakni administrasi serta politik. Paradigma ini menjelaskan terdapat pembelahan antara administrasi serta politik.

Paradigma kedua (1927-1937), disebut dengan paradigma prinsip administratif. Lokus administrasi negara bukan menjadi permasalahan pada paradig ini, tetapi fokus prinsip administrasi diasumsikan secara umum di tiap wujud organisasi. Administrasi mempunyai dasar-dasar yang jelas sehingga mampu diaplikasikan ke negara maju, meski memiliki budaya, lingkungan, tujuan yang berlainan. Tokoh-tokohnya yaitu Follet, Willoughby, Fayol, Taylor, Mooney & Reiley, dan Gullick & Urwick.

Paradigma ketiga (1950-1970) adalah administrasi negara yang menjadi ilmu politik. Paradigm ini mencoba untuk menerangkan ulang korelasi konseptual antara manajemen negara maupun ilmu politik. Dampak upaya ini ialah kebutuhan guna mengungkapkan fitur paling sedikit sehubungan dengan penekanan ilmiah yang melekat. Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik lebih menekankan pada birokrasi, meskipun penekanannya semakin berkurang.

Paradigma berikutnya (1954-1970), yakni administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Paradigm ini mengembangkan ide-ide manajemen yang mendalam. Pada fase ini, fokusnya yaitu tingkah laku organisasi, kajian manajemen, penelitian operasi, sedangkan lokusnya menjadi tidak jelas lantaran keseluruhan fokus diasumsikan dapat diterapkan di pemerintah maupun swasta.

Paradigma kelima (1970-saat ini), yakni administrasi sebagai administrasi publik. Administrasi negara sudah mengalami perkembangan sebagai ilmu administrasi negara, yakni mengarah ke teori organisasi, ilmu kebijakan, maupun ekonomi politik. Pada paradigma ini, fokus dan lokusnya jelas sehingga fokusnya

yaitu prinsip organisasi, manajemen, dan kebijakan publik, dan lokusnya adalah hal yang menyangkut permasalahan publik.

Selanjutnya, David Osborne dalam Pasolong (2014:33-37), memaparkan paradigma *Reinventing Government*. Paradigma ini memiliki prinsip untuk menuntut pemerintah sebagai pengarah dari pelaksana, mendayagunakan masyarakat, mengarahkan semangat untuk bersaing, berfokus ke tujuan maupun hasil, pelayan masyarakat, berjiwa wirausaha, mempunyai daya pencegahan, memiliki sifat desentralistis, dan berfokus ke pasar. Paradigma *reinventing government* disebut sebagai *new public management* (NPM) yang mengakui bila paradigma manajemen lama tidak cukup berhasil untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan layanan publik. NPM biasanya dilihat sebagai strategi administrasi publik yang mempergunakan manajemen bisnis dan disiplin lainnya guna mengoptimalkan efektivitas maupun efisiensi kinerja layanan publik di birokrasi kontemporer. Vigoda dalam Keban (2005:34) yang ditarik Harbani Pasolong (2014:36), menyatakan terdapat 7 prinsip NPM, ialah:

1. Penggunaan manajemen profesional pada sektor publik.
2. Penerapan tolok ukur kinerja.
3. Pemusatan lebih luas di kontrol *output*.
4. Bergesernya minat ke unit yang lebih kecil.
5. Bergeser ke persaingan yang lebih tinggi.
6. Pemusatan pada model bidang swasta di implementasi manajemen.
7. Pemusatan ke disiplin dan upaya menghemat terkait pemanfaatan sumber daya.

Setelah itu, terdapat paradigma baru yakni *New Public Service* (NPS) dikemukakan oleh J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt yang beranggapan bawasannya administrasi publik baru perlu:

1. Memberi pelayanan bagi masyarakat, bukanlah klien.
2. Memprioritaskan kepentingan masyarakat.
3. Lebih memuliakan kewarganegaraan dibanding kewirausahaan.
4. Memiliki pemikiran yang strategis dan berlaku demokratis.
5. Sadar jika pertanggungjawaban bukanlah menjadi perkara sederhana
6. Memberi layanan dibanding mengontrol
7. Hargai manusia, tidak hanya produktivitas belaka

Dalam administrasi publik terjadi pergeseran paradigma seiring dengan perkembangan zaman yang terdapat penyempurnaan dari paradigma yang sebelumnya. Dari uraian paradigma administrasi publik yang telah dijelaskan, penelitian ini cenderung mengarah kepada perspektif administrasi publik sebagai Ilmu administrasi publik karena terfokus dan berlokus jelas. Kajian terlaksana ke ruang lingkup publik dalam menjalankan kegiatan sebagai upaya pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Fokus dari administrasi publik pada kajian ini, yaitu bagaimanakan manajemen pariwisata yang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen lakukan sehingga lokus pada kajian ini berada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

1.6.3 Manajemen Publik

1.6.3.1 Pengertian Manajemen

Manajemen yang dikemukakan oleh para ahli dalam Dyah Hariani (2017:6-8), yaitu:

Drs. Malayu, S.P Hasibuan menuturkan bila manajemen ialah ilmu untuk mengelola tahap pendayagunaan sumber lain atas dasar efektivitas maupun efisiensi demi meraih tujuan khusus.

G.R. Terry melalui buku "*Principles of Management*" memaparkan bila manajemen ialah tahapan unik, yang meliputi proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, maupun pengawasan yang dijalankan, dan meraih target yang sudah ditetapkan dengan pendayagunaan SDM dan lainnya.

Harold Koontz dan Cyril O' Donnell melalui buku "*Principles of Management*", memaparkan bila manajemen merupakan upaya untuk mencapai maksud tertentu dengan pekerjaan pihak lain. Manajer menyelenggarakan koordinasi berdasarkan beberapa aksi pihak lain, mencakup merencanakan, mengorganisasi, peletakan staf, mengarahkan, dan mengawasi.

John D Miller pada buku dengan judul "*Management is the Public Service*" menyebut bila manajemen sebagai tahap bimbingan dan penyediaan fasilitas kepada kegiatan terkoordinir dalam kelompok formal guna meraih tujuan yang telah ditetapkan.

H.R. Light melalui buku "*the Nature of Management*", memaparkan bila manajemen ialah rancangan pengetahuan atas kepemimpinan. Tahapan

merencanakan, mengorganisasi, pengarahan, dan pengawasan material, mesin maupun anggaran guna meraih tujuan secara maksimal disebut dengan kepemimpinan.

Sondang P. Siagian melalui buku dengan judul “*Administrasi Pembangunan*”. Menyebut bila manajemen sebagai kemampuan mendapatkan hasil terkait upaya memperoleh tujuan dari aktivitas pihak lain.

Dari penjelasan tersebut, bisa memberi simpulan bila manajemen ialah tahapan-tahapan manajemen guna mencapai tujuan khusus melalui pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Tahapan-tahapan itu, seperti merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi. Fungsi manajemen itu mempunyai keterlibatan sendiri-sendiri dalam meraih tujuan yang telah di rumuskan.

1.6.3.2 Manajemen Publik

Manajemen publik pada prinsipnya merupakan manajemen instansi pemerintahan. Pendapat oleh Overman dalam Keban (2004:85) yang dikutip oleh Harbani Pasolong (2014:83), mengutarakan jika manajemen publik bukan “*scientific management*”, walaupun sangatlah terpengaruh oleh “*scientific management*”. Manajemen publik bukan “*policy analysis*” ataupun bukan administrasi publik, mencerminkan titik berat antara orientasi “*rational-instrumental*” di satu sisi, dan arah kebijakan politik di pihak lainnya. Manajemen publik ialah studi interdisipliner elemen organisasi yang menggabungkan aspek, meliputi merencanakan, mengorganisasi, dan pengaturan atas dasar sumber daya manusia, anggaran, politik, informasi, maupun fisik.

Overman, Ott, Hyde dan Shafritz (Keban, 2004:85) menuturkan bila manajemen publik dan kebijakan politik ialah dua disiplin ilmu administrasi publik yang tumpang tindih. Guna mengklasifikasikannya, maka bisa disebut jika kebijakan publik menggambarkan otak dan sistem saraf, lalu manajemen publik melambangkan jantung serta sistem peredaran darah. Atas dasar itulah, manajemen publik ialah tahap pengerahan sumber daya manusia maupun nonmanusia berdasar pada perintah kebijakan publik (Pasolong, 2014:83).

Sugandi (2011:49) memaparkan bila manajemen publik penuh dengan formalitas dan regulasi, berbeda dengan manajemen sektor swasta yang formalitas dan peraturannya yang sangat kurang. Formalitas dan peraturan tersebut muncul dari keputusan politik dari elite pejabat publik.

Berdasar definisi-definisi di atas menurut para ahli yang telah dipaparkan, pengertian manajemen publik dan manajemen secara umum hampir sama. Manajemen publik dimaknai sebagai suatu proses kegiatan kerja sama, koordinasi antara dua orang atau golongan di lingkup organisasi birokrasi (instansi publik) guna meraih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk melayani masyarakat.

J. Steven Ott, Albert C. Hyde dan Jay M. Shafritz dalam Pasolong (2014:83), mengutarakan bila manajemen publik terjadi peralihan dengan sejumlah wacana penting yang cukup menantang, seperti:

- a. Swastanisasi merupakan opsi untuk pemerintah memberi layanan publik
- b. Rasionalitas dan pertanggungjawaban
- c. Rencana dan pengendalian

- d. Finansial dan pengalokasian anggaran
- e. Produktivitas SDM

Berdasarkan pendapat Woodrow Wilson dalam Pasolong (2014:96), dalam bukunya "*The Study of Administration*". Wilson menempatkan empat prinsip mendasar terkait kajian administrasi publik sebagai ciri manajemen publik sampai saat ini, meliputi: (1) pemerintah menjadi pengatur utama organisasi. (2) Peranan eksekutif menjadi fokus utama. (3) Pemerolehan prinsip dan metode manajemen yang bertambah efektif untuk menjadi pokok pembangunan kemampuan administrasi. (4) Prosedur komparatif menjadi prosedur studi untuk mengembangkan administrasi publik.

Nicholas Henry dalam Pasolong (2014:97), menerangkan bila ciri manajemen publik tertera dari setiap paradigma:

1. Paradigma pertama, pemerintah didesak untuk memperbaiki sistem rekrutmen, pengujian personel, kategorisasi pekerjaan, promosi, hukuman, serta pensiun. Untuk memenuhi tujuan bangsa, maka pengelolaan SDM dan barang atau jasa harus dipertanggungjawabkan.
2. Paradigma kedua, mengembangkan prinsip tata kelola yang menjadi prinsip umum atau POSDCORB (*planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting*) sebagai karya terbaik dari Gullick dan Urwick pada tahun 1937. Akan tetapi, prinsip ini mendapat kritikan melalui karya "*Administrative Behaviour*", yang mengundang para pakar tidak sekadar melandaskan diri ke aspek normatif. Kritik ini

memungkinkan terjadinya penurunan pertumbuhan peran manajemen publik sebab para ilmuwan memilih untuk mencermati administrasi serta manajemen publik sebagai aktivitas politik atau sebagai gambaran yang lebih komprehensif perihal ilmu politik.

3. Paradigma ketiga, sebab peranan manajemen bukan sekadar disampaikan secara normatif, pun tidak mesti dilihat secara umum.
4. Paradigma keempat, sesudah tidak menyetujui kritik para cendekiawan ilmu politik, konsepsi manajemen tetap dikembangkan melalui dibangunnya School of Business dan administrasi publik maupun Journal Administrative Science Quarterly di Cornell University Amerika Serikat.

Pasolong (2014:97-98), mengatakan bila di medio 1990-an perkembangan modal manajemen publik baru (*The New Public Management*) sudah memberi inspirasi baru untuk mengembangkan manajemen publik di bermacam negara. Pada model manajemen publik baru, pemerintah diundang guna:

1. Menanggalkan paradigma administrasi lama demi fokus pada capaian kerja.
2. Menghindari birokrasi tradisional dan merancang posisi maupun keadaan kerja bisnis, karyawan, dan pekerjanya lebih fleksibel.
3. Tetapkan sasaran organisasi dan anggota secara tepat agar memberi peluang penilaian hasil melalui tolok ukur yang tidak ambigu, dengan fokus pada pengevaluasian program yang lebih terstruktur, serta penilaian mempergunakan tolok ukur ekonomi, efektivitas, maupun efisiensi.
4. Staf senior banyak berinvestasi secara politis dalam pemerintahan daripada mereka yang tidak memihak.

5. Fungsi pemerintah ialah tanggung jawab pemerintah untuk memperhatikan pasar; dengan demikian, penyediaan layanan tidak harus melalui birokrasi (mengikutsertakan swasta).
6. Peranan pemerintah direduksi melalui swastanisasi, yang merepresentasikan bila *The New Public Management* memfokuskan perhatian ke hasil dan bukanlah ke proses.

Untuk menggerakkan organisasi secara cepad dan mudah, diperlukan peranan manajemen untuk mencapai hal tersebut. Fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli dalam Hariani (2017:14) adalah sebagai berikut:

- a. George R. Terry, terdapat empat peranan krusial pada manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan.
- b. Henry Fayol, fungsi manajemen, ialah *Commanding, Controlling, Coordinating, Organizing, dan Planning*.
- c. Menurut Koontz Donne L, fungsi manajemen yakni terdiri atas: *Controlling, Directing, Organizing, Planning, dan Staffing*.
- d. William New Man, fungsi-fungsi manajemen terdiri atas: *Assembling of Resource, Directing, Controlling, Planning, dan Organizing*.
- e. S.S Siagian menyebut bila peranan manajemen, seperti *controlling, motivating, planning, dan organizing*.
- f. Ernest Dale menuturkan bila peranan manajemen, seperti merencanakan, mengorganisasi, penempatan staf, berinovasi, penggambaran, dan pengawasan.

Berdasar uraian tersebut, peneliti tertarik mempergunakan fungsi manajemen menurut George R. Terry, yaitu merencana (*planning*), mengorganisasi (*organizing*), pengarahan (*actuating*), mengawasi (*controlling*). Penjelasan mengenai fungsi manajemen sesuai berbagai para pakar, seperti:

1. Merencanakan (*Planning*)

George R. Terry dalam Hariani (2017:51) menuturkan bila merencanakan ialah tahap untuk memilih fakta dan mencoba menghubungkannya, berdasarkan asumsi masa depan dalam hal mendefinisikan dan mengartikulasikan tindakan yang direkomendasikan, serta dianggap perlu untuk mencapai tujuan.

Hasibuan (2016:21-23) menyebut jika perencanaan ialah mengelola personel secara cepat dan mudah berdasar pada kebutuhan perusahaan untuk mendukung tujuannya.

Johnson, dkk dalam Wijaya (2016:28) menyampaikan pendapat bila proses merencana sebagai serangkaian tindakan yang sudah ditetapkan. Berbagai tujuan maupun strategi perusahaan dikembangkan melalui perencanaan ini, yang sejak awal menggunakan pengambilan keputusan, inti dari manajemen.

Ghozali dalam Ridhotullah dan Jauhar (2015:128), menyusun rencana meliputi:

1. Perumusan tujuan.
2. Pemahaman terhadap situasi sekarang.
3. Pertimbangan terhadap faktor yang menghambat maupun mendukung pencapaian tujuan.

4. Perencanaan aktivitas guna memperoleh tujuan.

Berlandaskan definisi di atas, perencanaan merupakan proses penyusunan atas fakta-fakta yang dihadapi untuk membuat rumusan atau gambaran aktivitas mendatang guna tercapainya tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan mengembangkan organisasi ke depannya.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Hasibuan (2016:21-23), pengorganisasian adalah proses pengorganisasian semua pekerja dengan memulai membagi kerja, keterkaitan kerja, mendelegasikan kewenangan, mengintegrasikan, dan berkoordinasi secara hierarki perusahaan. Pengorganisasian meliputi dua atau banyak individu yang menggunakan strategi terstruktur untuk mencapai tujuan (Umam, 2012:27).

George R. Terry dalam Wijaya (2016: 40) menyebut bila mengorganisasi ialah proses menetapkan keterkaitan tugas yang eksplisit di antara individu-individu sehingga setiap individu bisa menjalin kerja sama secara efektif guna memperoleh tujuan.

Ernest Dale dalam Handoko (2011:168), pengorganisasian adalah tindakan mengembangkan struktur formal, mengklasifikasikan dan mengatur tugas atau tugas, dan mengalokasikannya kepada personel agar berhasil memenuhi tujuannya.

Berlandaskan uraian di atas, pengorganisasian ialah proses kegiatan pembagian kerja, koordinasi, dan delegasi wewenang atau mengalokasikan sumber daya, menetapkan struktur organisasi, dan penempatan SDM pada letak yang akurat

secara efisien dan efektif sesuai dengan aturan dan terstruktur agar tujuan dicapai secara cepat dan mudah.

3. Pengarahan (*Actuating*)

Hasibuan (2016:21-23), mengatakan bila pengarahannya ialah tindakan pengarahannya terkait semua pekerja supaya bisa menjalin kerja sama dan berkontribusi secara cepat maupun mudah demi memperoleh tujuan perusahaan, pegawai, ataupun masyarakat. Koontz & O'Donnel dalam Wijaya (2016:41), mendefinisikan bila pengarahannya atau *actuating/directing* adalah tindakan mengarahkan setiap individu yang ada di organisasi guna diajak atau dibujuk agar berpartisipasi dalam kerja sama guna meraih tujuan organisasi.

Terry dalam Syafiie (2010:81), mengutarakan bila *actuating* (pelaksanaan) merupakan kegiatan untuk memastikan jika keseluruhan anggota kelompok mau berupaya meraih tujuan sehingga berdasar pada rencana manajerial dan upaya perusahaan. Siagian (2011:106) menyebutkan *actuating* dapat dianggap sebagai upaya total, pendekatan, teknik, dan cara memotivasi anggota organisasi untuk tampil seefisien, seefektif, serta semurah mungkin untuk memenuhi tujuan organisasi.

Berdasar pendapat Silalahi (2011:270), suatu tindakan mengarahkan mempunyai tahap, seperti:

a. Komunikasi

Gatewood dan Taylor dalam Amirullah (2004:282), menuturkan bila komunikasi menjadi suatu tahap mengalihkan informasi dan definisi dari masing-masing pihak. Informasi maupun pemahaman bisa dialihkan ke

beragam bentuk, berupa lisan atau tulisan, serta prosedur lain untuk mentransfer informasi maupun pemahaman yang bisa berwujud telepon, memo, ataupun laporan. Komunikasi penting bagi manajemen sebab tahapan manajemen akan terselenggara bila komunikasi dilaksanakan. Komunikasi ialah bertukar informasi (menyampaikan dan menerima) informasi antara pengirim dengan penerima, maka adanya saling memahami antardua pihak sebab mempunyai arti selaras mengenai pesan yang tersampaikan dan diterima.

b. Kepemimpinan

Bersumber pada perspektif manajemen, kepemimpinan merupakan keterkaitan dampak antara manajer dan pegawai guna meraih tujuan perusahaan berkeadaan keadaan khusus. Kepemimpinan diartikan sebagai keterkaitan ketika pimpinan memengaruhi pihak lain agar sanggup menjalin kerja sama dalam menjalankan tugas demi meraih tujuan. Fungsi pimpinan pun dibutuhkan guna untuk mengusahakan keikutsertaan masyarakat menjalankan aksi, maka fungsi pimpinan disini sangatlah penting untuk menumbuhkan keikutsertaan masyarakat untuk meraih tujuan berdasarkan pendapat Terry dan Frankin dalam Amirullah (2004:245).

c. Motivasi

Sukanto dan Handoko dalam Amirullah (2004:218) berpendapat jika motivasi merupakan kondisi dalam diri individu yang memicu harapan individu untuk menjalankan tindakan-tindakan khusus untuk meraih tujuan. Motivasi bermakna sebagai hal atau situasi yang memicu dorongan.

Berlandaskan definisi para pakar tersebut, bisa dikatakan bila pengarahan sebagai aktivitas guna menggerakkan anggota organisasi dalam melaksanakan tujuan melalui cara, teknik, dan metode yang digunakan maupun dilakukan melalui proses komunikasi, kepemimpinan, dan motivasi dengan sesuai perencanaan dan pengorganisasian sudah di rumuskan sebelumnya.

4. Pengawasan (*controlling*)

Controlling biasa dikenal sebagai upaya untuk mengendalikan dan termasuk sebagai fungsi manajemen, yaitu menyediakan penilaian, dan bilamana harus melakukan perbaikan agar apa yang dilaksanakan bawahan dicapai sesuai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Umam, 2012:27).

Terry dalam Wijaya (2016:46), berpendapat bila pengawasan sebagai upaya terstruktur untuk menetapkan apa pun yang sudah tercapai sehingga turut memengaruhi penilaian kinerja yang dilandasi oleh perencanaan awal.

Robert J.M. dalam Handoko (2011:360) menuturkan bila pengawasan manajemen ialah upaya terstruktur guna menentukan standar pelaksanaan atas dasar tujuan perencanaan, mengatur sistem informasi umpan balik, sebagai perbandingan atas kegiatannya dengan standar yang ditentukan, menetapkan maupun mengukur penyelewengan-penyelewengan, dan menarik kegiatan perbaikan yang dibutuhkan sebagai jaminan bila seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

T. Hani Handoko (2013:360) mengutarakan bila terdapat lima tahapan pada pengawasan, yakni:

1. Menentukan standar penerapan (perencanaan)

Langkah awal pada pengawasan, yakni penentuan standar pengawasan. Standar mempunyai pemahaman sebagai pengukuran dan menjadi pedoman untuk evaluasi terhadap tujuan, hasil, maupun perwujudan yang dipakai sebagai standar.

2. Menentukan pengukuran dalam melaksanakan aktivitas

Penentuan standar menjadi percuma apabila tidak diikuti beragam tindakan sebagai pengukuran atas implementasi aktivitas nyata. Atas dasar itulah, langkah ini bermaksud guna menetapkan pengukuran dalam melaksanakan tindakan dengan cepat.

3. Mengukur penerapan aktivitas nyata

Sesudah frekuensi pengukuran dan sistematika pengawasan ditetapkan, pengukuran dilaksanakan untuk dijadikan tahapan yang berulang-ulang dan secara kontinu. Terdapat beragam tindakan guna melaksanakan pengukuran implementasi, yakni dengan melakukan observasi, laporan tertulis atau tidak tertulis, prosedur otomatis dan inspeksi, tes, atau bisa dengan mengambil sampel.

4. Perbandingan antara implementasi aktivitas dengan standar maupun analisis penyimpangan

Perbandingan implementasi nyata dengan implementasi yang sudah ditetapkan atau ketentuan yang direncanakan sebelumnya menjadi langkah yang termudah dilaksanakan, tetapi kerumitan dapat timbul ketika

menafsirkan adanya penyelewengan (deviasi). Penyimpangan perlu di analisis guna memastikan alasan standar tidak bisa diraih.

5. Penentuan tindakan koreksi apabila diperlukan

Apabila hasil analisis memperlihatkan kegiatan perbaikan, maka kegiatan tersebut perlu dilakukan. Kegiatan perbaikan bisa terlaksana ke dalam tiga bentuk. Standar bisa berubah, implementasi dikoreksi, atau kedua-duanya dapat dilaksanakan secara bersama. Kegiatan perbaikan bisa berwujud:

- a. Pengubahan standar awal (terkesan tinggi atau terkesan rendah)
- b. Pengubahan terhadap pengukuran implementasi (frekuensi pengawasannya terlalu kerap dilaksanakan atau jarang maupun mengubah sistem pengukuran tersebut)
- c. Mengganti metode analisis dan menerapkan penyelewengan-penyewengan.

Berlandaskan pemaparan tersebut, bisa memberi simpulan bila pengawasan ialah kegiatan mengamati seluruh proses kegiatan organisasi baik melakukan penilaian dan koreksi atas hal yang dapat menghambat melalui tahapan-tahapan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan. Dalam penelitian ini manajemen didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi, merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan/menerapkan, dan mengawasi.

1.6.3.3 Faktor sumber daya yang memengaruhi proses manajemen

Keberhasilan organisasi selama memperoleh tujuan yang telah direncanakan melalui sejumlah unsur yang membentuk kegiatan manajemen. Oleh karena itu, unsur-unsur manajemen menjadi faktor yang mempengaruhi dalam proses

manajemen. George R. Terry dalam Rohman (2017:12) menuturkan bila unsur manajemen dikenal sebagai “*the six M in management*” (6M) yaitu:

1. *Man*

Manusia mempunyai pengaruh penting dalam organisasi yang melaksanakan fungsi manajemen. Manusia mempunyai gagasan dan keinginan yang dapat berfungsi untuk penentuan unsur lain. Melalui kuantitas maupun mutu manusia yang memadai, manajemen akan berjalan optimal. Berbeda jika kuantitas dan mutu tidak memadai akan berakibat pada terdapat kendala dan gagal untuk memperoleh tujuan.

2. *Money*

Uang tergolong sebagai faktor yang menentukan keberhasilan meraih tujuan. Dalam proses manajemen besar kecilnya unsur uang sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam meraih tujuan.

3. *Methods*

Metode dalam menjalankan kegiatan untuk meraih tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Pemilihan metode atau langkah-langkah dalam suatu kegiatan yang baik dari bermacam opsi yang tersedia, sehingga proses manajemen guna meraih tujuan sesuai dan berhasil.

4. *Material*

Di bermacam kegiatan sebagai tahap manajemen guna meraih tujuan kerap diperlukan bahan/material.

5. *Machines*

Merupakan alat atau pendukung (teknologi) yang dipakai agar bisa menunjang aktivitas memproduksi barang maupun jasa yang hendak diperjualbelikan, serta memberikan kemudahan bagi manusia di bermacam aktivitas sehingga fungsi mesin di zaman ini tidak bisa dipandang sebelah mata.

6. *Market*

Berarti pasar yang hendak produksi masuki untuk memperoleh sejumlah uang melalui produksi suatu produk badan/perusahaan yang bisa dipasarkan sehingga manajemen ditentukan menjadi unsur yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasar dibutuhkan guna menginformasikan hasil produksi hingga ke tangan pembeli/pengguna.

1.6.4 Pariwisata

1.6.4.1 Pengertian Pariwisata

UU Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisata, wisata ialah aktivitas perjalanan yang seseorang atau sekelompok individu lakukan untuk mendatangi suatu tempat dengan maksud berlibur, berekreasi, mengembangkan pribadi, maupun mempelajari segala keunikan lokasi wisata untuk beberapa saat/bersifat sementara. Pariwisata ialah bermacam aktivitas wisata dan ditunjang oleh beragam fasilitas yang masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah sediakan. Bahwa kepariwisataan sebagai semua aktivitas mengenai pariwisata dan sifatnya cenderung multidisiplin yang hadir sebagai perwujudan atas kebutuhan manusia maupun negara, dan sebagai interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, antarwisatawan, pemerintah, bahkan pengusaha.

Pariwisata ialah kegiatan untuk memberikan jasa pariwisata, penyediaan atau pengolahan terhadap objek maupun daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, serta usaha lainnya terkait bidang itu (Rai Utama, 2017:2). Marpaung (2016 : 11) mneyebut bila pariwisata sebagai sektor industri yang menangani jasa, seperti transportasi, tempat tinggal, keramahan, makanan dan minuman, maupun jasa terkait lain, meliputi keamanan, asuransi, dan sebagainya, termasuk penawaran tempat istirahat, kebudayaan, pelarian, dan petualangan. Dengan kata lain, pariwisata tidak sekadar menyediakan daya tarik wisata, melainkan jasa yang menunjang industri pariwisata.

A. J. Burkart dan S. Medik dalam Marpaung (2016: 12), mengemukakan bila pariwisata sebagai ajang seseorang atau sekelompok orang yang berpindah ke suatu tempat dengan kurun waktu singkat menuju ke tempat di luar tempat tinggal. Soekadijo dalam Marpaung (2016:12) mneyebut jika pariwisata sebagai bermacam aktivitas yang masyarakat lakukan: aktivitas itu terkait dengan wisatawan. Hunziger dan Krapf dalam Marpaung (2016: 13) menambahkan jika pariwisata ialah semua jaringan dan peristiwa terkait tinggalnya orang asing (wisnus ataupun wisman) di suatu tempat dengan persyaratan orang itu tidak melaksanakan pekerjaan penting yang memberikan untung yang sifatnya sesaat atau tetap.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diartikan bila pariwisata ialah suatu perjalanan ke lain tempat di luar tempat tinggal demi berlibur, berekreasi, maupun menghibur atau menyenangkan yang seseorang atau sekelompok individu lakukan di luar pekerjaannya.

Pendit dalam Rai Utama (2017:145) memaparkan bila pariwisata bisa terbagi atas motif wisatawan untuk datang ke suatu tempat. Jenis pariwisata itu, seperti:

1. Wisata kebudayaan, yakni perjalanan untuk memperluas perspektif hidup seseorang dengan berkunjung atau meninjau ke lain tempat untuk mencari tahu kondisi masyarakat di suatu daerah, mencari tahu adat, cara hidup, maupun mempelajari kesenian dan budayanya. Kegiatan-kegiatan dalam wisata budaya, meliputi eksposisi seni (seni tari, drama, musik, maupun suara) ataupun aktivitas yang memiliki motif sejarah.
2. Wisata maritim atau bahari kerap dihubungkan dengan aktivitas olahraga di air, terutama pantai, danau, teluk, ataupun laut semacam berlayar, memancing, dan sebagainya.
3. Wisata cagar alam diadakan oleh agen/biro perjalanan yang berkecimpung di bidang usaha dengan mengatur wisata ke kawasan cagar alam, taman lindung, kawasan hutan pegunungan dengan kelestarian alam dilindungi oleh undang-undang.
4. Wisata MICE (*meeting, incentive, conference, exhibition*) dipahami sebagai wisata konveksi, yang memiliki batasan berupa usaha konveksi, perjalanan insentif, dan pameran sebagai usaha dengan aktivitas memberikan layanan untuk suatu pertemuan dalam mendiskusikan permasalahan terkait kepentingan bersama.
5. Wisata agro, agrowisata untuk wisatawan adalah mengedukasi wisatawan dalam memahami kehidupan pertanian, dan untuk menikmati alam yang sehat

dan alamiah bebas dari polusi kota, mendapatkan produk pertanian yang segar dan organik.

6. Wisata berburu, jenis ini diselenggarakan di negara-negara yang memiliki kawasan atau hutan dimana perburuan diizinkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh beragam agen atau biro perjalanan. Wisata berburu ini disusun dalam bentuk safari berburu ke suatu kawasan ataupun hutan yang telah disahkan oleh pemerintah terkait.
7. Wisata ziarah, jenis wisata ini sedikit banyak dihubungkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan orang ataupun kelompok dalam masyarakat. Wisata ziarah banyak dilakukan oleh individu atau kelompok ke tempat-tempat suci seperti makam orang-orang besar ataupun pemimpin agung.

Dalam pengembangan objek wisata Indonesia terdapat aspek penting untuk menentukan kualitas keberadaan objek wisata. Bentuk aspek pariwisata di Indonesia adalah Sapta Pesona dalam Isdarmanto (2016:71-72) sebagai berikut:

1. Indah

Keindahan objek wisata yang mampu memberikan daya tarik tersendiri dari aspek kondisi alam, penataan *landscape*, arsitektur bangunan, dan aksesoris sesuai dengan lingkungan yang ada.

2. Aman

Faktor keamanan dan kenyamanan berwisata seperti terbentuknya privasi individu ataupun kelompok dalam menikmati suasana berwisata, fasilitas keamanan, kedisiplinan pengelola wisata dan wisatawan.

3. Tertib

Infrastruktur yang dikelola baik, terdapat petunjuk dan tanda larangan yang jelas.

4. Bersih

Kondisi lingkungan yang nyata serta keberadaan fasilitas sarana dan prasarana objek wisata yang terjamin kebersihannya dan kualitasnya akan mampu memberikan kenyamanan pada wisatawan dalam menggunakan fasilitas yang ada.

5. Sejuk

Suasana dan lingkungan yang dapat dinikmati wisatawan selama berkunjung sehingga wisatawan merasa nyaman dalam berwisata.

6. Ramah

Sikap dan perilaku sumber daya manusia pada pariwisata sebagai pengelola dalam memberikan pelayanan mampu memberikan kepuasan kepada wisatawan.

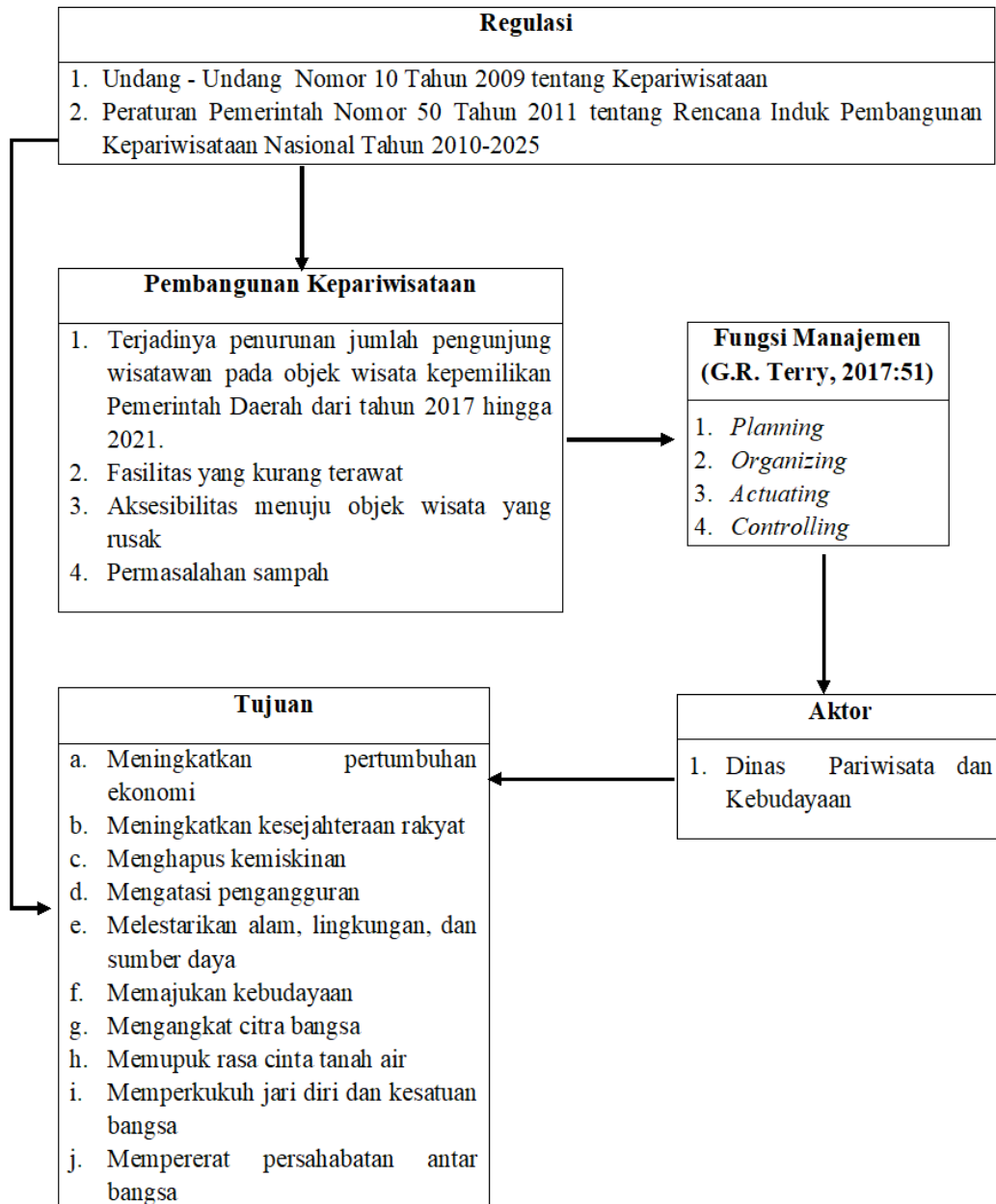
7. Kenangan

Salah satu amenities berupa souvenir, cenderamata, yang diharapkan mampu memberikan sentuhan hati wisatawan yang dapat dibawa.

1.6.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 1. 9

Kerangka Pemikiran



1.7 Operasionalisasi Konsep

Fenomena dalam penelitian ini adalah manajemen pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen di era Covid-19. Untuk melihat manajemen pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen di era Covid-19 maka peneliti menggunakan dasar pemikiran fungsi manajemen menurut G.R Terry. Hal tersebut berdasarkan pada fenomena yang akan diteliti berkaitan dengan Manajemen Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Di Era Covid-19.

1. Fungsi Manajemen

Dalam manajemen pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen di era Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan fungsi manajemen yang dikemukakan oleh G.R. Terry dengan mempertimbangkan empat fungsi, meliputi:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah suatu perumusan tujuan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga ke depannya tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan melalui sumber daya yang ada agar tercapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, perencanaan menjadi landasan utama dalam kelangsungan organisasi. Proses perencanaan mencakup:

1. Penetapan tujuan manajemen pariwisata
2. Penetapan anggaran manajemen pariwisata
3. Skala prioritas program manajemen pariwisata

4. Penetapan hambatan dan permasalahan dalam perencanaan

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses koordinasi, kerja sama, dan mengelompokkan, mengatur, pembagian tugas atau pekerjaan. Oleh karena itu, penempatan anggota organisasi perlu posisi yang tepat dalam pengorganisasian sehingga terciptanya organisasi yang digerakkan sebagai kesatuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengorganisasian meliputi:

1. Pembagian dan pengelompokkan pekerjaan dalam manajemen pariwisata
2. Pendistribusian wewenang yang jelas dalam kegiatan manajemen pariwisata

c. Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan merupakan suatu kegiatan untuk menggerakkan anggota organisasi meliputi komunikasi dan motivasi yang berdampak erat pada hasil yang diinginkan organisasi. Proses pengarahan meliputi:

1. Melakukan komunikasi di dalam manajemen pariwisata
2. Pemberian motivasi pada sumber daya pariwisata

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan kegiatan pemantauan atau pengamatan keseluruhan kegiatan organisasi baik inspeksi, penilaian, dan koreksi agar keseluruhan pekerjaan yang dikerjakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

1. Penentuan standar pengawasan yang dilakukan dalam manajemen pariwisata
 2. Mengidentifikasi hambatan dalam kegiatan manajemen pariwisata
 3. Menentukan upaya solusi dalam mengatasi hambatan dalam manajemen pariwisata
2. Faktor sumber daya yang mempengaruhi proses manajemen pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen di Era Covid-19

Faktor yang mempengaruhi proses manajemen pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen di Era Covid-19 adalah sebagai berikut:

a. *Man* (manusia)

Faktor *man* atau manusia dalam organisasi berkaitan dengan ketersediaan dan kemampuan manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

b. *Money* (uang)

Ketersediaan dan realisasi sumber keuangan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang ditargetkan.

c. *Methods* (metode atau cara)

Adanya standar operasional prosedur yang jelas dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

d. *Material* (bahan-bahan)

Material atau bahan-bahan yang dimaksud di urusan pariwisata adalah menjelaskan terkait kondisi, citra dan pembangunan objek wisata yang dimiliki dan dikelola organisasi guna meningkatkan hasil yang diharapkan.

e. *Machines* (sarana dan prasarana)

Berkaitan dengan penggunaan, kapasitas, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagai alat penunjang produktivitas yang dimiliki.

f. *Market* (pasar)

Pasar bertujuan untuk mempromosikan pariwisata dan memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat umum untuk mencapai tujuan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2016:1) pada bukunya tentang “Memahami Penelitian Kualitatif”, dijelaskan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji keadaan alamiah objek. Pada kondisi ini peneliti sebagai instrumen utama, dengan teknik pengumpulan datanya adalah triangulasi. Selain itu, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mementingkan makna daripada generalisasi.

Peneliti memakai jenis metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, karena kesesuaian topik dari penelitian yang akan diteliti dimana masalah yang diketahui melalui observasi awal (dugaan awal), sehingga penulis ingin untuk memperjelas permasalahan-permasalahan dari fakta-fakta apa saja yang ada di Manajemen Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen di Era Covid-19 melalui wawancara untuk mendapatkan data yang lebih mendalam.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi pelaksanaan kajian. Situs penelitian yang ditunjuk oleh peneliti adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

1.8.3 Subjek Penelitian

Berdasar pendapat Sugiyono (2016:54), Teknik *snowball sampling* ialah teknik pengambilan sampel yang pada awalnya jumlahnya kecil, lama-lama menjadi besar. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan teknik *snowball sampling* karena jumlah yang sedikit tersebut belum mampu menjawab pertanyaan dari peneliti, sehingga peneliti mencari narasumber lainnya yang dianggap mampu untuk menjadi sumber data sehingga peneliti memanfaatkan *teknik snowball sampling* dengan informan yang dimulai dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen yang selanjutnya akan menunjukkan ke bagian mana peneliti akan mendapatkan data yang mendalam.

1.8.4 Jenis Data

Lofland & Lofland dalam Moleong (2010:157), sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan sisanya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data ialah entitas apa pun yang dapat memberikan informasi terkait data. Standar penelitian kualitatif adalah data yang objektif. Menurut Sugiyono (2013:2), data definitif adalah data yang persis seperti apa adanya, serta data yang

mengandung makna visual dan audible. Sumber data yang dimanfaatkan pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui dua sumber data, yakni data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2013: 137), data primer merupakan data atau informasi yang didapat secara langsung mencakup dokumen-dokumen industri seperti sejarah pertumbuhan industri, struktur organisasi, serta lain sebagainya yang terkait dengan riset. Data primer diperoleh melalui sumber informan yakni orang ataupun perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh periset. Data primer ini meliputi catatan hasil wawancara, observasi lapangan, dan data terkait informan.

b. Data Sekunder

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2013: 137), mengutarakan bahwa data sekunder ialah data yang diharuskan guna menunjang hasil riset bersumber dari literatur, artikel, serta bermacam sumber lain yang berkaitan dengan riset. Data ini digunakan guna menunjang informasi primer yang sudah didapat yakni dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lainnya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Pada kajian ini, peneliti memakai teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Guna memperoleh data-data di objek kajian, teknik yang digunakan ialah:

1. Observasi

Merupakan proses mengumpulkan data dengan mengobservasi maupun mendokumentasikan secara metodis peristiwa yang diteliti. Observasi, yaitu melakukan pengamatan yang berhubungan langsung dengan lokus serta hal-hal yang berkaitan dengan riset. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2016:64), data observasi diperoleh dan seringkali dengan dorongan beragam perlengkapan alat yang sangat mutakhir, sehingga barang yang sangat kecil (proton serta elektron) ataupun benda yang sangat jauh (barang luar angkasa) bisa di observasi dengan jelas. Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2016:64), mengkategorikan observasi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:

a. Observasi Partisipatif

Pada observasi, peneliti berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari individu yang diamati atau sebagai sumber data untuk dipelajari. Saat melakukan pengamatan, peneliti berpartisipasi dalam tindakan sumber informasi dan mengalami suka serta duka mereka. Dengan pengamatan ini, informasi yang dihasilkan akan lebih tepat dan komprehensif.

b. Observasi Terus Terang atau Tersamar

Dalam hal ini, peneliti selama mengumpulkan data berterus terang mengatakan kepada informan bahwa sedang melangsungkan kajian, sehingga informan memahami dari awal hingga akhir akan kegiatan penelitian. Namun, pada suatu saat peneliti juga tidak secara terbuka maupun terselubung dalam melakukan pengamatan untuk mencari data yang masih bersifat rahasia.

c. Observasi Tak Berstruktur

Ialah pengamatan yang tidak terorganisir secara sistematis mengenai apa yang akan dilihat karena penekanan penelitian tidak jelas, maka fokus pengamatan akan berkembang sepanjang proses pengamatan. Jika masalah penelitian berbeda, observasi terorganisir dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi.

Oleh karenanya, peneliti hendak memakai teknik observasi terstruktur dan tersamar sebab peneliti mengamati langsung ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dan berharap mendapat data yang sifatnya rahasia melalui observasi tersamar.

2. Wawancara

Berdasarkan pendapat Esterberg dalam Sugiyono (2016), Wawancara adalah pertemuan antara dua individu dengan tujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui pertanyaan serta jawaban untuk mengembangkan makna tentang subjek tertentu. Jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, tetapi ingin mendapatkan informasi dari informan yang lebih dalam, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan informasi.

Pada penelitian ini akan memakai teknik wawancara mendalam yakni peneliti mengajukan berbagai pertanyaan secara mendalam yang berkaitan dengan fokus permasalahan. Selain mengacu pada pedoman wawancara, peneliti juga membangun pertanyaan secara spontan untuk memperoleh semua data yang

diperlukan untuk penelitian. Esterbeg dalam Sugiyono (2016:73), mengemukakan bermacam wawancara menjadi 3 (tiga), yakni:

a. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur diperlukan bila peneliti mengenali secara pasti tentang data yang hendak didapat. Oleh sebab itu, peneliti mempunyai instrumen wawancara (*interview guide*) yang opsi jawabannya juga sudah disiapkan.

b. Wawancara Semistruktur (*Semistruktur Interview*)

Wawancara ini tergolong dalam jenis wawancara mendalam, dimana dalam lebih bebas penerapannya dibanding wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini ialah untuk menemukan masalah yang lebih terbuka, dimana sumber data diminta pendapat dan ide-idenya.

c. Wawancara Tak Berstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengenali secara pasti informasi apa yang hendak didapat, sehingga peneliti lebih banyak mencermati apa yang diceritakan oleh informan.

Oleh karenanya, peneliti akan memanfaatkan teknik wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan untuk memudahkan pengambilan data secara spesifik terhadap permasalahan melalui instrumen wawancara (*interview guide*) agar memudahkan peneliti dan wawancara semi

terstruktur digunakan untuk wawancara yang sifatnya lebih terbuka, sehingga komunikasi yang terjalin lebih komunikatif.

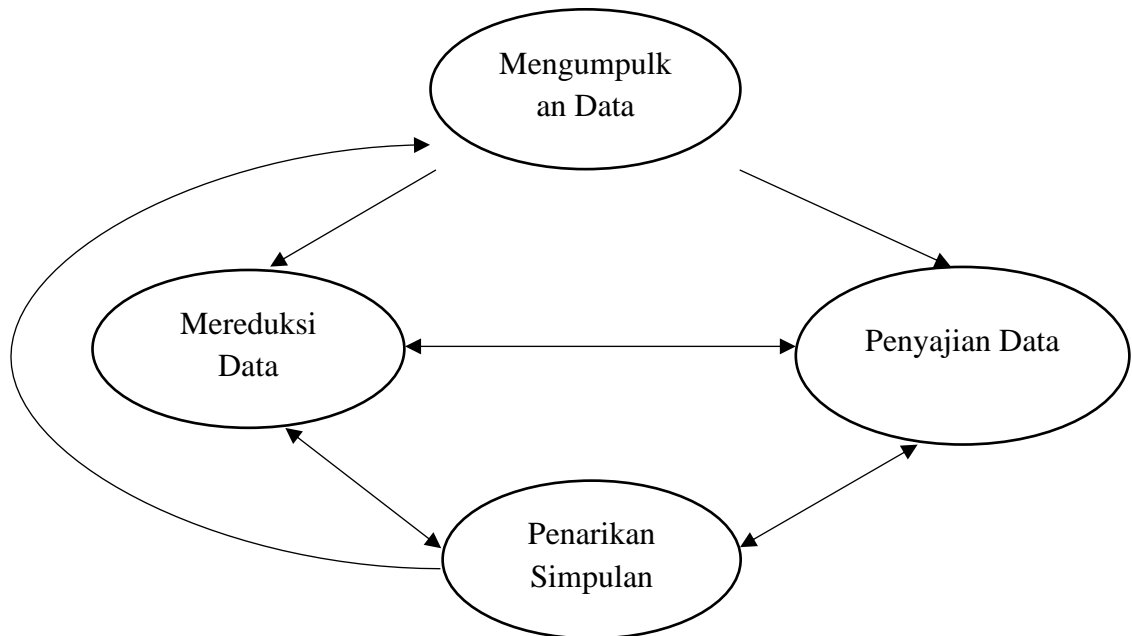
3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:82), dokumentasi ialah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, ataupun karya monumental seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti mendapat dokumen berupa arsip atau data yang berhubungan dengan manajemen pariwisata yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan mengambil gambar di lapangan yang berkaitan dengan proses manajemen pariwisata ataupun dokumentasi eksternal mencakup buku, jurnal ilmiah, data internet terkait yang membantu penelitian.

1.8.7 Analisis dan Intepretasi Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016:88), mengemukakan bahwa analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya mampu diinformasikan pada orang lain. Analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:92) melalui tiga tahapan, yaitu:

Gambar 1. 10
Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model)



Sumber: Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 2016.

a. Reduksi Data

Catatan lapangan terdiri dari huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol yang tetap campur aduk dan tidak dapat dipahami. Dengan reduksi, peneliti merangkum, mengekstrak informasi yang paling penting dan relevan, dan mengklasifikasikan data berdasarkan huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Simbol digunakan untuk mewakili data yang tidak berguna, yang kemudian dihilangkan karena dianggap tidak penting.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan sebagai deskripsi singkat, bagan, korelasi antar kategori, diagram alur, dll. menurut Miles dan Huberman

dalam Sugiyono (2016:95), penulisan naratif sering digunakan untuk mengkomunikasikan data dalam penelitian kualitatif.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin atau mungkin tidak dapat menjawab rumusan masalah awal karena penelitian ini bersifat sementara dan akan berubah selama penelitian dilakukan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah hasil baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kondisi ini mungkin merupakan hubungan sebab akibat atau interaksi, hipotesis atau teori, atau mungkin deskripsi atau gambar dari item yang sebelumnya tidak jelas atau tidak jelas, sehingga penelitian menjadi jelas.

Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan model teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

1.8.8 Kualitas Data

Teknik untuk mengukur keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kredibilitas dengan menggunakan sesuatu yang lain. Triangulasi dengan sumber berarti mengkomparasi dan memeriksa ulang tingkat keterpercayaan informasi yang didapat melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Melalui triangulasi, peneliti dapat mengecek kembali temuannya dengan cara mengkomparasi beragam sumber, metode, atau teori (Moleong, 2013: 332):

1. Mengajukan beragam variasi pertanyaan;
2. Memeriksa dengan sumber data;
3. Menggunakan beragam metode agar pemeriksaan kepercayaan data dapat dilakukan.